

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI SUMATERA BARAT**

**Yuskar
Febri Yanti**

**Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Email: yuskar_munaf@yahoo.co.id**

Abstract

Motor vehicle tax is one of local tax that contributed greatly to the revenue of Local Taxes in West Sumatra. This research aims to analyze the effectiveness and the factors that influence revenue of motor vehicle tax in West Sumatra . The factors suspected to affect revenue of motor vehicle tax in West Sumatra are the number of motor vehicles , number of population and economic growth . The data used in this study is secondary data 2007-2011 . The results of this study indicate that number of vehicles and population affect the revenue of motor vehicle tax, whereas economic growth does not affect to revenue of Vehicle Tax in West Sumatra . Therefore, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) can consider the number of vehicles and the number of population in setting policy on motor vehicle tax. In addition to increasing the revenue of the motor vehicle tax, DPKD can improve services in the motor vehicle tax payment process and socialize taxpayer liability.

Keyword: motor vehicle tax, number of motor vehicles, number of population, and economic growth

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bagian dari Pajak Provinsi. Di Sumatera Barat, Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT),

yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat. Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan Samsat *online* bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar pajak dan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaran/ STNK (SumbarOnline.com, 2011). Selain itu juga disediakan Samsat Keliling untuk melayani masyarakat di pelosok daerah untuk memudahkan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sumatera Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2011 tercatat bahwa jumlah penduduk di Sumatera Barat sebesar 4.904.460 jiwa. Semakin meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan mobilitas penduduk dalam bekerja dan beraktivitas. Semakin meningkatnya mobilitas akan meningkatkan sarana transportasi yang ada di Sumatera Barat. Seiring dengan perkembangan pembangunan, semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan bermotor semakin alat transportasi untuk melaksanakan aktivitasnya. Semakin banyaknya jumlah penduduk diharapkan akan meningkatkan jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Dimana tenaga kerja meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan memberikan banyak lapangan pekerjaan. Peningkatan pendapatan masyarakat atau tingkat kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi dari masyarakat.

Penelitian tentang analisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelumnya telah dilakukan oleh Syafruddin (2003), dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta cukup tinggi, sehingga mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial di DKI Jakarta. Jumlah

penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk membeli kendaraan bermotor, sehingga meningkatkan jumlah kendaraan bermotor. Pertumbuhan Jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada saat terjadi peningkatan jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor juga meningkat. Bahkan jumlah kendaraan bermotor dua kali lebih banyak dari jumlah penduduk yang berusia produktif dan bekerja berumur 15 sampai dengan 65 tahun serta bekerja dengan penghasilan menengah dan tinggi. Penelitian ini telah dilakukan oleh Syafruddin (2003) di DKI Jakarta dan Herzya (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah kendaraan bermotor, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah karyawan pemungut Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor dan PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terus meningkat setiap tahun disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian mengenai efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, serta pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat untuk periode tahun 2007-2011.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak propinsi yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat. Oleh karena itu pemungutan pajak ini harus dilakukan secara optimal dan efektif. Febriati (2011) melakukan penelitian dengan tentang sistem pengendalian pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD pada Dispenda Kota

Singkawang, hasil penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, analisis struktur organisasi dan *compliance test* ini adalah sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang sudah efektif, struktur organisasi sudah sesuai dengan perencanaan dimana terdapat pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab, sistem *internal control* sudah cukup efektif, faktor internal yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PKB yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dan petugas yang masih terbatas, dan faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PKB adalah luasnya wilayah Kota Singkawang yang menyebabkan target penerimaan belum mencapai target karena keterkambatan dalam proses pelaporan wajib pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih kurang dalam tata cara pemungutan.

Enggar (2011) melakukan penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode CCER dan CPI, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 2002-2009 mengalami peningkatan yang baik dan jenis pajak daerah yang paling efisien dan efektif berdasarkan hasil penelitian adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemungutan pajak daerah pada Provinsi Jambi, rata-rata adalah efektif dan efisien. Termasuk salah satu diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

H₁: Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor di Sumatera Barat sudah Efektif

Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Jumlah kendaraan bermotor akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara langsung. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Nuringasih (2006) melakukan penelitian mengenai penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menemukan bahwa penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah

desentralisasi didominasi oleh tiga pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah jumlah kendaraan bermotor, jumlah pemakaian bahan bakar minyak dan PDB per kapita Provinsi NAD.

Herzya (2011), melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat. menemukan bahwa jumlah kendaraan bermotor dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB. Sedangkan jumlah karyawan pemungut pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PKB. Selain itu, terjadinya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan bermotor di Sumatera barat karena semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta semakin baiknya pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara terpadu melalui sistem yang disebut SAMSAT.

H₂: Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penduduk di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor. Seiring dengan perkembangan teknologi, penduduk membutuhkan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk melaksanakan aktivitasnya. Semakin besar laju pertumbuhan penduduk ada kemungkinan menambah penerimaan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan bermotor, terutama penduduk yang berkecukupan dan sejahtera. Menggunakan kendaraan bermotor akan

mempermudah penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain itu, kendaraan bermotor yang ditawarkan juga beragam sesuai dengan penghasilan penduduk.

Ariasih (2011) melakukan penelitian mengenai jumlah penduduk dan PDRB per Kapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali. Dari hasil penelitian tersebut membuat simpulan bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB. Selanjutnya Novita (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Bruto, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan kebijakan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak kendaraan Bermotor. Berdasarkan penelitian tersebut, diduga bahwa jumlah penduduk akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat diajukan hipotesis:

H₃: Jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan jumlah penduduk, dimana pertumbuhan jumlah penduduk dapat berpengaruh positif ataupun negatif. Pertumbuhan penduduk potensial yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Herawati, 2000 (dalam Syafruddin, 2000: 34) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, meskipun indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan nilai produksi dalam suatu perekonomian, ia juga sesungguhnya memberikan indikasi tentang sejauhmana

aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Indikasi tersebut tersirat dalam angka pertumbuhan output karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output). Oleh sebab itu dari uraian diatas dapat diartikan bahwa bila terjadi pertumbuhan ekonomi secara langsung akan mempengaruhi atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi ini akan berhubungan erat dengan faktor stimulus yang mempengaruhinya. Jadi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Dimana peningkatan pendapatan ini akan mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor, untuk mempermudah mereka dalam melaksanakan aktivitas setiap hari.

Hasil dari penelitian Syafruddin (2011) menyatakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Jakarta akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta. Jumlah potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapatkan belum optimal. Hal tersebut karena banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang dan tidak aktifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN II. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat diajukan hipotesis:

H₄: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat

METODE

Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Penelitian ini ingin melihat hubungan antara variabel independen, jumlah kendaraan bermotor (x_1), jumlah penduduk (x_2) dan pertumbuhan ekonomi (x_3) dengan variabel dependen, penerimaan PKB (Y). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sumatera Barat (DPKD) Sumbar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar. Data yang digunakan adalah data tahun 2007-2011.

Definisi Operasional Penelitian

1. Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah angka yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai angka yang harus dicapai oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu tahun tertentu dalam satuan nilai rupiah.
2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah angka yang didapat setelah dilakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap wajib pajak selama tahun anggaran tertentu dalam satuan nilai rupiah
3. Jumlah Kendaraan Bermotor adalah banyaknya Kendaraan Bermotor yang terdapat pada suatu wilayah yang diukur dalam satuan unit. Kendaraan bermotor tersebut terdiri atas sedan, jeep, Micro Bus, SW/ Mini Bus, Bus, Pick UP, Light truck, Truck, Sepeda Motor dan Alat-Alat Berat
4. Jumlah Penduduk adalah banyaknya penduduk yang terdapat pada suatu daerah yang diukur dalam satuan jiwa per tahun.
5. Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Metode analisis data menggunakan analisis efektivitas dan analisis regresi berganda, efektivitas pajak digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan DPKD Sumbar mampu mencapai target penerimaan PKB yang telah ditetapkan. Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Tingkat efektifitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Rasio Efektivitas Pajak

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90% -100%	Efektif
80% -90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber tim litbang depdagri – kemendagri No. 690.900.327

Bentuk umum dari fungsi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

a_0 = Konstanta

X_1 = Jumlah Kendaraan Bermotor

X_2 = Jumlah Penduduk

X_3 = Pertumbuhan Ekonomi

$a_1 a_2 a_3$ = Koefisien regresi

e = Error item

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan analisis efektivitas yang dilakukan, yaitu dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, rata-rata efektivitas

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera barat tahun 2007-2011 sebesar 109,46. Nilai tersebut lebih dari 100%, yang berarti sangat efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama diterima. Dimana berdasarkan analisis yang dilakukan, penerimaan PKB di Sumatera Barat sangat efektif. Target penerimaan PKB yang ditetapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan ini mengalami fluktuasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak DPKD adapun dasar menjadi pertimbangan dalam menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- 1) Menganalisis trend penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya
- 2) Menghitung potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, berdasarkan data pertumbuhan pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan keluar-masuk. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan masuk adalah kendaraan kendaraan plat BA yang melakukan balik nama menjadi BA dan kendaraan Non-BA yang melakukan balik nama menjadi kendaraan dengan plat BA
- 3) Menganalisis saran dari masing-masing SAMSAT yang ada

Adapun usaha yang dilakukan pihak DPKD dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah:

- 1) Adanya Bus Samsat Keliling yang mulai beroperasi pada tahun 2008. Samsat keliling menjangkau tempat-tempat yang lokasinya jauh dari kantor Samsat, agar memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor tahunan. Untuk saat ini ada 3 Bus Samsat Keliling dan sudah mencapai daerah Padang, Painan (Tapan), Dhamasraya (Sungai Rumbai), Pasaman Barat (Ujung Gading, Silaping, Kinali), Kabupaten Solok (Alahan Panjang, Kubung), Kabupaten 50 Kota (Muaro Paiti), Sijunjung (Kamang Baru), Batusangkar (Lintau), Pariaman (Lubuk Alung), Lubuk Basung (Matur), Solok Selatan (Lubuk Malako, Muaro Labuh), Bukittingi (Banuhampu, Ampek Angkek), Kota Pariaman (Sungai Geringging), Payakumbuh (Taeh, Halaban).
- 2) Bekerja sama dengan pihak kepolisian melalui penyelenggaraan razia secara rutin ataupun berkala terhadap kendaraan yang belum membayar pajak.

- 3) Memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor berupa pelayanan jemput antar proses pembayaran PKB (*Samsat Quick Respons*). Kegiatan pelayanan SQR ini baru dilaksanakan pada beberapa kecamatan yang berdekatan dengan lokasi Kantor Bersama Samsat. Dengan pelayanan SQR ini, masyarakat dapat menelepon *Call Centre* Samsat pada masing-masing daerah agar menjemput surat-surat kendaraannya untuk diproses pada kantor Samsat dan kemudian diantar kembali ke rumah pemilik kendaraan.
- 4) Mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada wajib pajak sebelum jatuh tempo terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Surat Peringatan jika pajak belum bayar pada saat jatuh tempo.
- 5) Adanya peningkatan jumlah Samsat yang pada tahun 2007 hanya berjumlah 15 Samsat, sekarang sudah berjumlah 18 Samsat.

Karena adanya usaha dari pihak DPKD inilah, efektivitas penerimaan PKB di Sumbar dapat tercapai. Namun, penetapan target penerimaan PKB hanya berdasarkan jumlah kendaraan yang membayar PKB, belum mempertimbangkan jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan yang ada di Sumbar.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Enggar (2011) mengenai efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah Provinsi Jambi. Dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode CCER dan CPI, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Daerah Provinsi Jambi, rata-rata adalah efektif dan efisien. Salah satu pajak daerah yang diteliti adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Tingkat efektivitas penerimaan PKB rata-rata adalah sangat efektif. sejalan dengan penelitian ini, dimana tingkat efektivitas penerimaan PKB di Sumbar tahun 2007-2011, rata-rata adalah sangat efektif.

Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pengujian hipotesis kedua didapatkan hasil bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jumlah

kendaraan bermotor yang membayar PKB akan mempengaruhi secara langsung penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin banyak jumlah kendaraan yang membayar PKB, maka akan meningkatkan penerimaan PKB. Hasil ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herzya (2011), dimana jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan bermotor di Sumatera Barat disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta semakin baiknya pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara terpadu melalui Samsat. Berkaitan dengan pengelolaan pemungutan PKB melalui Samsat, hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam membayar PKB. Selain itu jumlah Samsat di Sumbar juga telah meningkat dari 15 Samsat pada tahun 2007 dan menjadi 18 Samsat pada tahun 2011. Hampir disetiap Kabupaten/Kota di Sumbar memiliki kantor Samsat.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Sumbar, namun pengaruhnya negatif. Secara logika, hasil penelitian ini tidak logis. Dimana jika terjadi peningkatan jumlah penduduk, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan menurun. Seharusnya, peningkatan jumlah penduduk juga meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana, seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah kendaraan bermotor juga akan meningkat. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan penerimaan PKB. Hal ini dapat diakibatkan oleh data jumlah penduduk yang digunakan adalah data jumlah penduduk secara keseluruhan, bukan berdasarkan umur ataupun pendapatan. Pertumbuhan penduduk meningkat, namun kebanyakan merupakan penduduk yang berumur dibawah 17 tahun dan penduduk dengan tingkat pendapatan yang rendah. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya hubungan yang negatif antara jumlah penduduk dan penerimaan PKB.

Selain itu juga bisa disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang sudah tua, yang sering diberikan keringanan pajak. Penelitian ini tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita (2010), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pendaraan Bermotor.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis keempat didapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini mungkin saja pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi pendapatan per kapita penduduk di Sumatera Barat. Adanya kemauan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua disebabkan oleh gencarnya promosi yang dilakukan oleh *dealer* kendaraan bermotor, berupa pemberian bonus, uang muka yang rendah dan prosedur yang mudah dalam mendapatkan kendaraan roda dua. Selain itu, semakin banyaknya merek kendaraan bermotor yang ada dengan harga yang terjangkau. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin (2003). Hasil penelitian oleh Syafruddin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Di Jakarta akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta. Jumlah potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Hasil penelitian Syafrudin (2003) menyebutkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta diikuti oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, nantinya akan mempengaruhi penerimaan PKB di DKI Jakarta secara langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis mengenai analisis efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat tahun 2007-2011, rata-rata adalah sangat efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah jumlah pajak kendaraan bermotor dan jumlah penduduk, secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Sumatera Barat. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh; 3) Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Sumatera Barat sebesar 98,4%. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Penelitian ini berimplikasi terhadap penetapan kebijakan mengenai pajak kendaraan bermotor oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sumatera Barat, sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih maksimal. Pada akhirnya penelitian ini memiliki keterbatasan terkait data yang digunakan bukan data terkini, yaitu tahun 2007-2011. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustri, N. 2011. Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat (1979-2008). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Ariasih, P. N. N. 2011. Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. *Jurnal Universitas Udayana* 543-562.
- Departemen Dalam Negeri. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman penilaian dan Kinerja Keuangan.

- Enggar D.P.A, S. Rahayu dan I. Wahyudi. 2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi). *Jurnal Seri Humaniora* 13(1):69-82.
- Febriati. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. *Jurnal Eksos* 7(2):165-185.
- Gayatri, G. A. 2013. Penjualan Motor Tetap Tinggi.
<http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=48508>. 6 Desember 2013 (11:13)
- Hendrico. 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (studi empiris pada Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Herzya, G. Z. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Hardiningsih, P dan N. Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3(1):126 - 142.
http://www.sumbaronline.com/berita-4266-menunggu-realisis-samsat_online-di-sumbar-.html
- Kurniawan, A. 2012. DP Naik Ancam Pasar Sepeda Motor.
<http://otomotif.kompas.com/read/2012/02/22/1011/DP.Naik.Ancam.Pasar.Sepeda.Motor>. 6 Desember 2013 (10:55)
- Lutfi. A. 2006. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis dan Birokrasi* 14(1).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. ANDI. Yogyakarta.
- Nadina. 2012. Analisis Pengaruh Jumlah Pelanggan, Penjualan Daya Listrik dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Nugraha, A. S. 2012. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2001-2010). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nuringsih, M. 2006. Analisis Penrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Thesis*. Jurusan Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Novita. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah.
- Sari, N. Y. 2012. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Padang.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi 3. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Syafruddin. 2003. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. *Tesis* : Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang no 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- www.wikipedia.com. Pertumbuhan Ekonomi. 17 Desember 2013 (14:20)
- Yose, kantor samsat bersama padang mencapai target, http://bakinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1242:samsat-bersama-padang-mencapai-target&catid=35:kota-padang&Itemid=56. 29 September 2013 (21:18)

Lampiran 1

Tabel 1
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Kab/Kota	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor				
		2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Agam	2.972.651.225	3.447.632.950	4.799.234.175	5.450.920.625	6.430.288.025
2	Dharmasraya	4.653.729.304	6.272.239.705	8.212.991.037	8.906.323.852	10.972.605.572
3	Pariaman	7.128.149.025	8.024.110.850	10.227.731.475	11.643.748.310	14.377.172.325
4	Pasaman	3.334.337.860	3.261.979.775	4.059.505.670	5.296.549.345	5.296.549.345
5	Pas. Barat	3.374.218.715	4.817.125.425	6.993.513.930	10.459.096.235	10.459.096.235
6	Pessel	3.930.206.450	4.753.408.925	6.248.858.300	7.164.450.675	8.901.774.650
7	Sijunjung	4.566.194.007	4.301.167.968	5.421.772.775	6.060.698.070	7.649.874.700
8	Solok	8.525.437.225	9.225.099.825	11.856.123.540	13.564.508.950	14.833.543.630
9	Solok Selatan	1.354.925.350	1.850.753.825	2.597.968.400	2.832.654.945	3.573.760.066
10	Tanah Datar	5.519.690.475	6.474.464.245	8.022.336.925	8.755.553.475	10.173.915.857
11	Bukittingi	12.481.039.525	13.456.129.925	17.037.138.300	18.551.294.400	21.011.051.175
12	Padang	96.109.499.150	117.292.449.785	122.513.220.450	153.315.121.175	195.877.863.600
13	P. panjang	2.673.266.425	3.020.933.650	3.884.496.150	4.429.923.175	5.104.965.800
14	Payakumbuh	12.981.648.975	14.731.243.209	11.770.128.875	13.302.812.675	15.400.345.325
15	Sawahlunto	2.479.153.675	2.767.309.650	3.475.536.830	3.797.659.475	4.560.576.325
Jumlah		172.084.147.386	203.696.049.712	227.120.556.832	273.531.315.382	334.623.382.630

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sumatera Barat

Lampiran 1

Tingkat Efektivitas Penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumbar 2007-2011

No	Tahun	Target Rp.	Realisasi Rp.	Efektivitas %	Kriteria
1	2007	154.080.000.000	172.734.891.451	112,11	Sangat Efektif
2	2008	183.056.000.000	207.015.219.500	113,09	Sangat Efektif
3	2009	225.725.867.000	231.868.053.395	102,72	Sangat Efektif
4	2010	253.475.048.000	275.640.090.918	108,74	Sangat Efektif
5	2011	311.435.000.000	344.518.115.462	110,62	Sangat Efektif
Rata-rata Efektivitas				109,46	Sangat Efektif

Lampiran 2

Hasil Estimasi Uji F - ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.809	3	4.270	15.023	.000 ^a
	Residual	.202	71	.003		
	Total	13.011	74			

Sumber : diolah dari data sekunder

Lampiran 3

Hasil Estimasi Uji t

Model		T	Sig.
1	(Constant)	46.676	.000
	JKB	64.449	.000
	JP	-2.852	.006
	Pertumbuhan Ekonomi	.397	.692